

**PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN
LITERASI POLITIK GEN-Z DI SEKOLAH SMA ASUHAN
DAYA MEDAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

SKRIPSI

*Diajukan guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

NAURAINI RUSYID PANGGABABEAN
NPM. 2202060013



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 April 2026, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
NPM : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd.

Sekretaris

Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, M.Hum.

ANGGOTA PENGUJI:

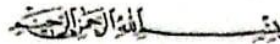
1. Hotma Siregar, S.H, M.H.
2. Lahmuddin, S.H., M.Hum.
3. Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umh.ac.id> E-mail: fkip@umh.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Nauraini Rusyid Panggabean
N.P.M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik
Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Saya Medan Tahun Pelajaran
2025/2026.

sudah layak disidangkan.

Medan, 6 April 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Diketahui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Syamsuarnita, M.Pd

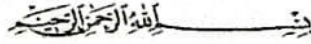
Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Nauraini Rusyid Panggabean
N.P.M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Saya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/01/2026	Acc seminar proposal		
02/02/2026	Bimbingan pertama		
05/02/2026	Bimbingan kedua		
14/03/2026	Revisi bab IV		
31/03/2026	Revisi Bab V		
02/04/2026	Revisi kesimpulan dan saran		
03/04/2026	Revisi Daftar Rujukan		
04/04/2026	Revisi lampiran Harus lengkap		
06/04/2026	Per revisi lain		

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, 06 April 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Nauraini Rusyid Panggabean
N.P.M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026." adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, 06 April 2026

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Nauraini Rusyid Panggabean
Nauraini Rusyid Panggabean

ABSTRAK

Nauraini Rusyid Panggabean. 2202060013. Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026. Skripsi. Medan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026. (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Guru Menjalankan Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026. (3) Untuk mengetahui Bagaimana Siswa Memahami Isu-Isu Politik Terkait Hak dan Kewajiban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Pancasila berjumlah 1 orang dan penelitian ini melibatkan 3 siswa-siswi SMA Asuhan Daya Medan yang dipilih dari Ketua Osis, Danton Paskibra dan Pimpinan Regu Pramuka. Pemilihan responden dilakukan secara proporsional untuk mewakili seluruh kelas agar data yang diperoleh lebih beragam dan tidak bias. Jumlah 3 siswa dipilih karena dianggap cukup untuk memperoleh data yang mendalam sesuai tujuan penelitian serta efisien dalam waktu dan pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila memiliki peran dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z. Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian materi ajar semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu membentuk Literasi Politik tentang cara pandang hidup siswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran dalam Pembentukan literasi politik siswa. (2) Dalam Proses Pembelajaran di kelas Guru sebagai Pengajar, Pembimbing dan sebagai Ilmuan. Namun lebih dari sekadar penyampaian materi, guru Pendidikan Pancasila juga turut andil dalam membentuk literasi politik siswa. Guru Menggunakan Metode Pembelajaran di Kelas yaitu Diskusi terbuka dan Diskusi Kelompok. Metode ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga membentuk literasi politik pada siswa. (3) Penelitian menunjukkan melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Mata Pelajaran ini memiliki Peran yang sangat penting salah satunya membentuk Literasi Politik. Hanya saja Guru harus lebih sering untuk melakukan diskusi agar siswa mempunyai daya pikir yang lebih kritis dalam memahami isu-isu politik seperti hak dan kewajiban warga negara.

Kata kunci : Peran, Pendidikan Pancasila, Literasi Politik

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaat di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala peneliti merasa telah sampai di final pada jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Peneliti menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi peneliti berusaha agar skripsi ini baik dan benar, keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, Keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026”.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak menerima bantuan baik moril, materil serta spiritual yang sangat tidak ternilai harganya. Terkhusus dan teristimewa, peneliti ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibunda Tersayang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA dan kini telah selesai menyelesaikan

pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Peneliti persembahkan untuk bunda yang telah mengisi dunia peneliti begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Serta tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan untuk anak-anaknya mencapai cita-cita, semangat, kasih sayang serta perhatian yang dengan sabar dan penuh kasih sayang merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidik peneliti. Semoga dengan Penelitian Skripsi ini, dapat memberikan suatu kebahagiaan dan kebanggaan Ibunda dan semoga selalu sehat wal'afiat, aamiin.

Peneliti juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. **Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
3. **Ibu Dr. Hj. Dewi Kesuma Nasution, S.S., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Mandra Saragih, S.Pd., M.Hum** selaku wakil dekan III Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Ryan Taufika, M.Pd** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

6. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Bapak Dr. Zulkifli Amin, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada keluarga besar yang telah memberi semangat, dukungan dan motivasi serta sudah mendoakan peneliti agar peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua teman sekelas peneliti Pendidikan Pancasila 22 A Pagi yang telah berbagi suka dan dukanya selama perkuliahan.
11. Terima Kasih Kepada Teman Teman seperjuangan saya yaitu teman teman HMJ PPKn FKIP UMSU, PK IMM FKIP UMSU serta Tim Kreatif FKIP UMSU yang selalu memberikan Semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi in dengan baik.
12. Terima Kasih Kepada Teman Seperjuangan saya, Rekan seperjuangan saya pada Saat menjabat sebagai Ketua Umum yaitu Para Ketua Umum HMJ FKIP UMSU P.A 2025-2026 yaitu Anjeli, Nurrizqi, Ramadira, Gilang, Dea yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi pada penulisan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan

skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 April 2026

Nauraini Rusyid Panggabean
2202060013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kerangka Teoritis.....	10
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	35
3.4 Sumber Data Penelitian.....	35

3.5 Instrumen Penelitian	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V	64
KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.2 Tabel Waktu Penelitian	34
Tabel 3.5 Instrumen Penelitian	36
Tabel 4.1.1 Data Peserta Didik	47
Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana	47
Tabel Hasil Wawancara Informan 1.....	72
Tabel Hasil Wawancara Informan 2.....	76
Tabel Hasil Wawancara Informan 3	80
Tabel Hasil Wawancara Informan 4.....	83
Tabel Hasil Wawancara Informan 5.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Sekolah	46
Dokumentasi Wawancara Informan 1.....	91
Dokumentasi Wawancara Informan 2.....	91
Dokumentasi Wawancara Informan 3.....	92
Dokumentasi Wawancara Informan 4.....	92
Dokumentasi Wawancara Informan 5.....	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Jawaban Wawancara Informan.....	72
Lampiran 2 Dokumentasi	91
Lampiran 3 K1.....	94
Lampiran 4 K2.....	95
Lampiran 5 K3.....	96
Lampiran 6 Surat Izin Riset	97
Lampiran 7 Surat Balasan izin riset dari sekolah	98
Lampiran 8 Pengesahan Skripsi	99
Lampiran 9 Berita Acara Bimbingan Skripsi	100
Lampiran 10 Turnitin.....	101
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menekankan pendidikan "bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Pendidikan nasional adalah untuk menerangi masyarakat. Istilah "kecerdasan" mencakup lebih dari sekedar kecerdasan intelektual ia juga meliputi kecerdasan holistic dan komprehensif yang memiliki definisi yang lebih luas (Aziizu, 2015).

Secara umum, tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang bermoral, berkualitas tinggi, dan berintegritas. Diharapkan bahwa generasi yang dihasilkan akan memiliki kombinasi seimbang antara kecerdasan intelektual dan emosional, mampu beradaptasi dengan tuntutan teknologi modern dan perubahan zaman, serta memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional (Amini,Dkk, 2020).

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempersiapkan individu melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar mampu menjalankan peran mereka di masa depan. Dalam hal ini sekolah berfungsi sebagai institusi pendidikan formal yang secara sistematis

menciptakan berbagai lingkungan pembelajaran guna memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam beragam aktivitas edukatif. Setiap proses Pendidikan diarahkan untuk mencapai pengembangan diri yang optimal, sejalan dengan potensi unik yang dimiliki oleh masing-masing siswa.

Salah satu tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan berbagai posisi dan tantangan dalam kehidupan secara berkelanjutan. Menurut (Novianti, Dkk, 2020) mengemukakan bahwa "pendidikan merupakan suatu kegiatan khas manusia yang melibatkan proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pengalaman kepada individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu anak-anak memahami cara menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan dapat membentuk kepribadian dan perilaku siswa secara positif (Salsabila, 2022). Selain itu, pendidikan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan kualitas moral dan psikologis siswa. Sebagai sebuah institusi yang didirikan atas dasar nilai-nilai mulia, pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki moral yang baik, berperilaku sopan, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk membantu siswa mengembangkan karakter moral dan integritas mereka, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan di Indonesia memiliki peran vital dalam pembentukan literasi politik siswa. Namun, meskipun terdapat kebijakan yang jelas mengenai pendidikan hak dan kewajiban siswa, implementasinya masih jauh dari ideal. Hal ini tercermin dalam rendahnya pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai individu dan warga negara.

Dalam sebuah negara demokrasi proses demokratisasi mutlak memerlukan peran dan keikutsertaan warga negara dalam urusan pemerintahan utamanya dalam bidang politik. Warga negara harus terbangun kesadarannya untuk ikut terlibat dalam kehidupan dan proses politik berbangsa dan bernegara baik sebagai pelaku maupun partisipan politik. Warga negara yang memiliki dorongan untuk ikut serta dan memainkan peran dalam urusan politik adalah warga negara yang memiliki pemahaman tentang politik. Paham politik adalah dimana warga negara secara sadar mengerti hak dan kewajibannya, utamanya dalam bidang politik dan kemudian ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses politik, proses perumusan kebijakan, memantau implementasi kebijakan publik dan ikut terlibat sebagai kontrol sosial bilamana kebijakan publik tersebut keluar dari haluan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penanaman nilai-nilai politik melalui sebuah usaha pendidikan politik.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang menuju kearah lebih baik dengan proses demokratisasi yang terus berjalan maju ke depan memerlukan warga negara yang mutlak memiliki keterdidikan politik yang

baik. Pemahaman terhadap konsep politik melalui pendidikan politik bagi warga negara harus berjalan beriringan dengan proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan tentu saja pendidikan politik yang diberikan harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satu elemen warga negara yang wajib dan harus melek politik adalah warga negara muda. Dengan jumlah warga negara muda yang cukup besar serta akan mengalami bonus demografi, maka membangun keterampilan politik warga negara muda Indonesia adalah hal mutlak yang harus dilakukan.

Warga negara muda memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap peristiwa sejarah bangsa, warga negara muda selalu muncul sebagai motor penggerak. Selain itu warga negara muda merupakan penerus estafet perjalanan bangsa ini. Bagaimana bangsa ini akan terus berjalan ke arah yang baik bila warga negara muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini awam terhadap politik. Jumlah warga negara muda dalam struktur warga negara Indonesia memiliki jumlah yang signifikan, mereka ini merupakan tulang punggung utama bagi laju gerak demokrasi. Sebagian dari mereka ini terdidik secara akademik bahkan menegayam pendidikan tinggi. Warga negara muda bisa muncul sebagai kekuatan moral dan agen perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara muda yang lekat dengan pendidikan dan memiliki kemampuan secara akademis dan intelektualitas harusnya memiliki wawasan kebangsaan dan tertarik pada pemikiran masalah sosial politik kenegaraan bangsa. Di

tengah politik yang kian dipersepsikan negatif karena banyak menampilkan muka buruknya membangun keterdidikan politik warga negara muda merupakan hal yang penting.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi fondasi dalam pembentukan literasi politik siswa seperti kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Ridzal menegaskan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan bertanggung jawab, pendidikan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila (ridzal, 2023). Namun, Nur et al. menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila sering kali tidak diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum, yang mengakibatkan siswa tidak memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka (Nur et al., 2023). Pendidikan Pancasila harus diberikan dengan pendekatan yang inovatif dan mendalam untuk memaksimalkan dampaknya.

Peran guru sangat krusial dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan konsep hak serta kewajiban siswa. Keterlibatan orang tua juga penting dalam mendukung pendidikan karakter, tetapi seringkali, komunikasi antara sekolah dan orang tua tidak berjalan efektif (Galuh & Dewi, 2022). Tanpa dukungan menyeluruh dari lingkungan keluarga dan pendidikan, implementasi hak dan kewajiban siswa akan semakin sulit tercapai.

Lingkungan sosial dan budaya di sekitar siswa juga memengaruhi pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban. Sujarwo et al. mencatat bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan dan diwariskan kepada generasi muda untuk membentuk individu yang mengerti keharmonisan dalam hak dan

kewajiban mereka (Sujarwo et al., 2024). Namun, budaya yang ada mungkin tidak sepenuhnya mendukung kesadaran ini, terutama di komunitas yang tidak mengedepankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten.

Dalam kerangka sistem pendidikan formal, Pendidikan Pancasila mengemban mandat utama untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif. Pendidikan Pancasila idealnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan normatif tentang hak dan kewajiban warga negara dengan praktik partisipasi politik yang nyata, termasuk kesiapan menggunakan hak pilih saat Pemilu. Materi Pendidikan Pancasila mencakup fondasi penting seperti sistem politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, implementasi Pendidikan Pancasila di lapangan seringkali dikritik karena terlalu kaku, dengan Dominasi pendekatan ceramah dan menghafal undang-undang, yang justru gagal menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan motivasi partisipasi yang relevan dengan politik kontemporer.

Kesenjangan yang terjadi antara kurikulum Pendidikan Pancasila yang ideal dan realitas praktiknya di lapangan menjadi masalah sentral yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil studi awal yang telah dilakukan di SMA Asuhan Daya Medan, ditemukan permasalahan menyangkut Peran Mata Pelajaran khususnya Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila yang masih menunjukkan adanya pemahaman Literasi politik yang belum merata oleh siswa disekolah SMA Asuhan Daya Medan. Konsekuensinya, peserta didik cenderung kurang terampil dalam memahami Pengetahuan mereka tentang politik. Temuan ini mengindikasikan bahwa Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan

Literasi Politik peserta didik masih belum maksimal. Adanya Siswa yang tidak Peduli permasalahan tentang Isu-Isu Politik yang sedang terjadi karena mereka merasa politik juga tidak dapat berpengaruh apa apa dalam kehidupan mereka. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor Pertama yaitu faktor internal Kurangnya Kesempatan Siswa untuk terlibat dalam Proses Politik disekolah. Kedua, faktor eksternal juga berkontribusi terhadap permasalahan ini, khususnya dalam Pembentukan Literasi Politik siswa yaitu Kurangnya Akses ke informasi yang kurang Akurat dan Objektif. Kurangnya Pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dan proses politik serta kurangnya keterampilan berpikir kritis seperti siswa perlu mengembangkan keterampilan kritis untuk menganalisis informasi politik dan membuat keputusan yang tepat. Literasi politik diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan bernegara dan memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, mulai dari tantangan pendidikan nasional secara umum hingga kondisi spesifik di SMA Asuhan Daya Medan, maka efektivitas strategi yang digunakan oleh guru dalam Membentuk Literasi Politik memerlukan kajian mendalam. "Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026 “**.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis berfokus pada Kemampuan Siswa Memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara. sebagaimana judul skripsi yaitu : **“Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026”**

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026?
2. Bagaimana Guru Menjalankan Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026?
3. Bagaimana Siswa Memahami Isu-Isu Politik terkait Hak dan Kewajiban?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Guru Menjalankan Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Siswa Memahami Isu-Isu Politik Terkait

Hak dan Kewajiban.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat Mengetahui Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z dan sebagai bahan referensi untuk mengkaji permasalahan yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Kepada Lembaga Sekolah

Untuk memberikan informasi tentang efektivitas pendidikan Pancasila dalam membentuk literasi politik Gen-Z, sehingga sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Kepada Guru

Untuk memberikan masukan kepada guru-guru supaya dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dalam membentuk Literasi politik Gen-Z.

c. Kepada Siswa

Untuk Membantu Meningkatkan Literasi politik Gen-Z, Sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

d. Kepada peneliti

Untuk Membantu Peneliti Mengembangkan Kemampuan Penelitian, Analisis Data dan Meningkatkan Kemampuan Peneliti tentang Pendidikan Pancasila, Literasi Politik dan Gen-Z.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Peran Pendidikan Pancasila

a. Pengertian Peran

Secara Etimologis, Istilah "Peran" Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia Diartikan Sebagai "Pelaku Atau Tokoh Dalam Sebuah Sandiwara". Namun, Dalam Konteks Sosial Dan Pendidikan, Makna Peran Jauh Lebih Luas Dan Dinamis. (Abd Rahman, 2019) Menjelaskan Bahwa Peran Mencakup Hak Dan Kewajiban Yang Terkait Dengan Posisi Seseorang Dalam Suatu Sistem Atau Struktur Sosial.

Dalam kajian sosiologi. Menurut (Nugroho,Dkk, 2017) peran bukan sekadar kedudukan formal, tetapi mencerminkan sejauh mana seseorang mampu melaksanakan tanggung jawab, memenuhi ekspektasi sosial, serta menjembatani antara nilai-nilai institusional dengan kebutuhan peserta didik. Dalam praktiknya, peran guru sering kali mencakup tugas yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga moral, sosial, dan psikologis.

b. Pengertian Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dengan kajian dan pembahasan yang mencakup pengetahuan tentang kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani. Pendidikan Pancasila (Civic Education) memberikan wawasan kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (Intelligent and Civilized Citizens). Civic intelligence dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan

kewajibannya sebagai warga negara masyarakat, serta mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ubaedillah dan Rozak). Pendidikan Pancasila adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep Pendidikan Pancasila memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal yang harus dimiliki setiap warga negara dan pada akhirnya mampu menjalankan perannya dalam negara demokratis.

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap dan moral peserta didik agar memiliki karakter dan kepribadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai wahana pembinaan perilaku pada siswa juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Maulana Arafat Lubis, 2020).

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang berusaha membangun *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* peserta didik sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan terwujud. Pendidikan Pancasila pada dasarnya ujung tombak untuk membangun karakter

bangsa peserta didik, karena pendidikan Pancasila adalah pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pancasila.

2.1.2 Literasi Politik

Literasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan tentang sistem pemerintahan, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan argumen yang berkaitan dengan isu-isu politik (Handayani, 2023). Literasi politik adalah alat bagi individu untuk terlibat aktif dalam advokasi, diskusi, serta pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat (Farikiansyah et al., 2024). Sejumlah ahli juga memberikan perspektif yang berbeda mengenai literasi politik. Menurut Farikiansyah et al., literasi politik adalah elemen penting dalam Pendidikan Pancasila yang dapat memproyeksikan visibilitas politik dan membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Penguatan pemahaman politik yang kokoh diyakini mampu memperkuat peran masyarakat sipil serta meningkatkan kualitas demokrasi, di mana semua orang mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Dalam kerangka ini, paparan terhadap pendidikan politik yang kritis dan reflektif menjadi sangat penting dalam

mengembangkan kemampuan literasi politik yang efektif, dengan mempertimbangkan bahwa pendidikan tidak sekadar transfer pengetahuan tetapi juga merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik.

a. Pengertian Literasi Politik

Literasi berasal dari bahasa Inggris, *literacy*. Asal kata *literacy* dari kata latin '*littera*' yang berarti *letter* atau huruf, sehingga *literacy* sering diterjemahkan sebagai melek huruf. Huruf sama artinya dengan aksara, maka diperkenalkanlah istilah keberaksaraan untuk memperhalus istilah melek huruf. Secara umum, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis. Oleh karena itu, literasi tidak terlepas dari keterampilan bahasa yaitu pengetahuan bahasa tulis dan lisan yang memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan tentang genre dan kultural.

Bernard Crick dalam tulisannya *Essays on Citizenship* menyatakan bahwa literasi politik sebagai suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang harus dikembangkan bersama, tiap item mengkondisikan dua item lainnya. Dasar literasi politik berarti pemahaman praktis atas konsep-konsep yang digambarkan dari kehidupan dan bahasa sehari-hari. Literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik, melainkan cara membuat warga efektif dalam kehidupan publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif baik resmi maupun yang sifatnya sukarela.

Merujuk pada Catherine Macrae, literasi politik adalah bauran kompleks

dari praktek-praktek sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. Warga komunitas dilengkapi pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka dalam kaitannya dengan politik lokal, nasional dan internasional. Mahasiswa melalui pengetahuan, skill dan sikap politiknya tak sekedar melek tetapi juga perlu berpartisipasi aktif dalam arus perubahan politik yang semakin dinamis.

Menurut Jenni S Bev, literasi politik mengacu kepada seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Singkatnya, ada kemampuan untuk mandiri di depan pemerintah. Hal ini tidak berarti bertujuan untuk menjadi seorang politisi karir, tetapi untuk berpikir dan bertindak sebagai konstituen informasi. Sehingga para pejabat pemerintah tidak bisa menjadi siapa mereka tanpa kita.

Literasi politik, sebagai suatu konsep yang kritis dalam konteks pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap proses politik, telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan beragam pendekatan. Menurut Hapid, literasi politik melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan isu-isu politik serta pengambilan keputusan (HAPID, 2021). Definisi ini menunjukkan bahwa literasi politik tidak hanya melibatkan pemahaman teoritis, tetapi juga memerlukan penerapan dalam konteks nyata yang menjangkau aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat.

Katarudin dan Putri menambahkan bahwa literasi politik memiliki implikasi langsung terhadap partisipasi politik pemilih, terutama bagi mereka yang baru pertama kali memberikan suara dalam pemilu (Katarudin & Putri,

2020). Literasi politik memungkinkan individu memahami dinamika pemerintahan dan struktur politik sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan terinformasi dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sartika dan Parasari yang mencatat bahwa literasi politik berfungsi sebagai alat untuk memaknai dan menginterpretasikan konsep politik dalam kehidupan sehari-hari, mendukung rakyat dalam mengidentifikasi aspirasi dan keputusan politik yang relevan bagi mereka (Sartika & Parasari, 2024).

Secara umum, literasi politik dapat dipahami sebagai suatu kemampuan yang rumit dan terdiri dari berbagai aspek, mencakup pemahaman secara teoritis, keterampilan praktis, serta kemampuan analitis untuk berpartisipasi dengan efektif dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, literasi politik berfungsi sebagai fondasi yang vital bagi individu agar tidak hanya berperan sebagai pemilih yang paham, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang terlibat secara aktif.

b. Fungsi Literasi Politik

Fungsi dari literasi politik adalah untuk membantu individu serta masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan berkontribusi dalam dunia politik. Berikut ini adalah beberapa fungsi literasi politik yang lebih terperinci:

- a. Membantu memahami berbagai konsep politik: Literasi politik memfasilitasi pemahaman individu terhadap berbagai ide dalam politik seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan sistem pemerintahan.
- b. Menganalisis berbagai isu politik: Literasi politik mendukung individu dalam menganalisis masalah politik seperti kebijakan publik, pemilihan umum, dan

konflik yang terjadi dalam politik.

- c. Mengkritisi informasi politik: Literasi politik memberikan individu kemampuan untuk menganalisis informasi politik termasuk berita, propaganda, dan retorika yang ada.
- d. Berpartisipasi dalam aktivitas politik: Literasi politik mendorong individu untuk terlibat dalam proses politik seperti memilih, berunjuk rasa, dan berorganisasi.
- e. Membuat keputusan yang informasional: Literasi politik memberikan dorongan bagi individu dalam membuat keputusan tentang politik yang didasarkan pada data dan analisis yang tepat.
- f. Mengkritisi kekuasaan: Literasi politik memungkinkan individu untuk mempertanyakan kekuasaan dan meminta pertanggungjawaban dari pemimpin politik.
- g. Membangun masyarakat yang lebih baik: Literasi politik membantu individu untuk membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.
- h. Meningkatkan kesadaran politik: Literasi politik memainkan peran dalam meningkatkan pemahaman politik individu dan masyarakat mengenai isu-isu serta proses yang berlangsung dalam politik.
- i. Meningkatkan partisipasi politik: Literasi politik berdampak dalam meningkatkan keterlibatan politik individu dan masyarakat dalam proses yang ada.
- j. Meningkatkan akuntabilitas: Literasi politik berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas pemimpin politik dan pemerintah terhadap masyarakat.

c. Aspek-Aspek Literasi Politik

Praktik literasi politik merupakan satu diantara simpul kekuatan politik warga negara. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik.

1. Pengetahuan Politik

Pengetahuan mengenai politik merujuk pada pemahaman serta kesadaran seseorang terhadap ide-ide politik, masalah-masalah politik, dan mekanisme politik. Pengetahuan politik mencakup wawasan mengenai struktur politik, ide-ide politik, isu-isu politik, serta cara kerja politik. Memiliki pengetahuan politik memungkinkan individu untuk mengerti bagaimana pengaruh politik hadir dalam kehidupan sehari-hari dan cara mereka terlibat dalam proses politik. Pengetahuan dalam bidang ini juga memfasilitasi individu untuk mengambil keputusan yang tepat serta menganalisis kekuasaan yang ada. Dengan demikian, pengetahuan politik menjadi fundamental dalam membangun komunitas yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

Pengetahuan politik adalah kekuatan yang dapat membawa pada demokratisasi masyarakat, tetapi pendekatan pendidikan politik yang tradisional sudah tidak relevan lagi, maka tujuannya harus praktis, difokuskan pada pendidikan politik yang berorientasi peran sehingga pendidikan politik dapat membantu kelompok yang kurang beruntung menjadi beruntung.

Ada beberapa jenis pengetahuan yang idealnya dimiliki seseorang dan hal tersebut secara politik akan membuat masyarakat melek politik, antara lain adalah:

1. Informasi mendasar tentang sejumlah isu; siapa yang memegang kekuatan, dari mana uang tersebut datang, bagaimana sebuah institusi berjalan,
2. Bagaimana untuk menjadi terlibat secara aktif menggunakan pengetahuan dan memahami kealamian isu,
3. Bagaimana untuk memprediksi jalan yang paling efektif atas penyelesaian isu,
4. Bagaimana untuk mengenali seberapa baik objektivitas kebijakan telah diraih dan isu-isu yang ada sudah beres,
5. Bagaimana untuk memahami pandangan orang lain dan justifikasi mereka untuk aksi mereka

2. Keterampilan Politik (political skill)

Keterampilan politik adalah kemampuan untuk secara efektif memahami orang lain di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan tujuan sendiri. Orang dengan keterampilan politik yang kuat memiliki kualitas sebagai berikut:

1. Mereka mudah membayangkan diri mereka dalam posisi orang lain atau mengambil sudut pandang orang lain.
2. Mereka dapat memahami situasi dan menentukan respon terbaik. Mereka dapat menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan Situasi.
3. Mereka mengembangkan jaringan yang besar, dan dikenal oleh banyak orang.
4. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan kerjasama dari Orang Lain.
5. Mereka membuat orang lain merasa nyaman. Individu dengan keterampilan politik yang kuat dapat menggunakannya untuk keuntungan organisasi (misalnya, mendapatkan kerja sama dari berbagai kelompok), menggunakan

keterampilan politik untuk keuntungan politik sendiri, bagaimanapun, dapat membahayakan organisasi. Oleh karena itu, keterampilan politik dapat bersifat positif, tetapi hanya jika digunakan untuk mencapai tujuan yang sesuai.

3. Sikap Politik

Sikap politik merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap politik muncul setelah orang melihat, memahami dan menghayati apa dan bagaimana kegiatan politik itu, sehingga kemudian membuat tindakan untuk melakukan pilihan. Sikap politik merupakan pre-disposisi atau kecenderungan bertindak secara politik, yang masih bersifat internal (Sastroatmodjo, 2020).

Sikap politik adalah cara individu dalam merespons dan mengevaluasi isu-isu politik, pemimpin politik, dan institusi politik. Sikap politik mencakup pendapat, perasaan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku politik individu. Sikap politik dapat berupa:

1. **Pendapat:** pandangan individu tentang isu-isu politik, seperti kebijakan publik atau pemilihan umum.
2. **Perasaan:** perasaan individu terhadap pemimpin politik, partai politik, atau institusi politik.
3. **Nilai-nilai:** nilai-nilai yang mempengaruhi keputusan politik individu, seperti keadilan, kebebasan, atau kesetaraan.

Sikap Politik ini dapat dipengaruhi dan dapat mempengaruhi seseorang ataupun masyarakat, yang diantaranya yaitu:

1. Sikap politik dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengalaman: pengalaman individu dalam proses politik, seperti memilih atau berpartisipasi dalam demonstrasi.
- b. Pendidikan: pendidikan formal dan informal tentang politik dan pemerintahan.
- c. Media: berita, artikel, dan program televisi tentang politik dan pemerintahan.
- d. Lingkungan sosial: lingkungan sosial individu, seperti keluarga, teman, dan komunitas.

2. Sikap politik penting karena dapat mempengaruhi:

- a. Perilaku politik: sikap politik dapat mempengaruhi perilaku politik individu, seperti memilih atau berpartisipasi dalam proses politik.
- b. Keputusan politik: sikap politik dapat mempengaruhi keputusan politik individu, seperti memilih pemimpin politik atau mendukung kebijakan publik.

D. Pentingnya Kegiatan Literasi Politik

Ada tiga alasan mengapa kegiatan literasi politik diperlukan antara lain:

1. Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara, terutama dalam mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada.
2. Kedua, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi pada

kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif, serta menguatnya distorsi politik media.

3. Ketiga, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (discourse). melainkan, perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Heryanto, 2011: 194-195).

E. Meningkatkan Literasi Politik

Menurut Ustman Abdul Muiz Ruslan (2010:96), kesadaran politik dapat dicapai melalui beberapa cara yakni:

1. Arahan politik langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran langsung yang dilakukan oleh pakar pemikir dan pemimpin-pemimpin politik
2. Pengalaman-pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik
3. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku politik serta mengikuti berbagai peristiwa dan perkembangan politik.
4. Kesadaran yang muncul melalui dialog-dialog kritis
5. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, *apprenticeship* dan generalisasi maka seluruh metode ini mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila

A. Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Tujuan utama dari pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah untuk mencetak individu yang utuh secara moral, intelektual, dan sosial, serta mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut (Liana, 2016), Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian Pancasila dan memiliki komitmen terhadap pembangunan masyarakat Pancasila yang berkeadaban.

Tujuan pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik secara seimbang. Dengan kata lain, peserta didik tidak cukup hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Muchtaron,Dkk,2019) menyatakan bahwa pendidikan ideal adalah pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk mereka menjadi manusia yang baik secara moral dan berakhlak mulia.

Menurut (Yamin & Muslich, 2020) menyatakan bahwa pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus dilakukan dengan pendekatan yang integratif, partisipatif, dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran serta sikap bertanggung jawab sebagai warga negara. Pembelajaran yang efektif dalam Pendidikan Pancasila akan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, demokrasi, dan kepedulian

sosial, yang merupakan manifestasi dari pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembelajaran Pendidikan Pancasila telah diintegrasikan secara menyeluruh dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Winataputra (2016), hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila tidak hanya relevan bagi pelajar di usia sekolah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran kritis warga negara dewasa dalam memahami hak dan kewajiban konstitusional mereka. Dengan demikian, keberadaan Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional menjadi instrumen yang sangat penting dalam menghadapi tantangan pembentukan generasi bangsa yang bermoral, berwawasan kebangsaan, dan memiliki integritas yang tinggi (Winataputra, 2016). Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menciptakan warga negara yang paham akan pentingnya bernegara, meningkatkan kepekaan terhadap jati diri serta moralitas bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, pendidikan ini berupaya meningkatkan kualitas manusia agar menjadi pribadi yang berbudi luhur, mandiri, tangguh, profesional dan bertanggung jawab. Secara mendasar pendidikan Pancasila adalah upaya yang terencana dan terarah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencakup penanaman jati diri dan moral bangsa sebagai dasar dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi kelangsungan dan kejayaan bangsa negara kita. Standarisasi pendidikan Pancasila meliputi pengembangan :

- a. Nilai-nilai cinta tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara

- d. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Kerelaan dalam berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara.
- f. Kemampuan awal dalam bernegara (Ummah, 2019).

B. Fungsi Pendidikan Pancasila

Fungsi pendidikan Pancasila adalah sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, serta setia pada bangsa dan negara Indonesia, ini tercermin didalam pola pikir dan tindakan yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara harfiah, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu *panca* yang berarti lima dan sila yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau sebuah bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab dan moral yang di jadikan sebagai dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar - dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia, telah di jadikan sebagai ideologi, pandangan hidup, keyakinan, cita-cita bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan bersama seluruh masyarakat Indonesia menuju kehidupan masa depan yang lebih baik. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hasil perenungan mendalam mengenai masa depan kehidupan yang di cita-citakan, serta prinsip hidup sesuai dengan cita-cita masa depan bangsa Indonesia. Suatu pandangan hidup pasti mengandung isi tentang konsep - konsep dasar mengenai masa depan dan cita-cita yang di harapkan, serta cara mencapainya secara prinsipil. Pancasila merupakan pandangan hidup yang harus dijadikan sebagai

pedoman dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup, karena secara historis Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang telah lama ada dan hidup serta berkembang dalam akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia.

Selain Pancasila sebagai ideologi, Pancasila juga sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut telah di sepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Semua pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan bagi bangsa Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Di samping itu, Pancasila juga di katakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa berbagai upaya pengembangan tata kehidupan kenegaraan yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum apapun dalam kehidupan berbangsa harus berdasarkan Pancasila. Pembentukan peraturan perundangan juga di tegaskan dalam UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sementara UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan, ini artinya peraturan perundangan yang berada di bawah Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.

Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila melahirkan dan menjadi landasan sumber-sumber hukum sebagaimana disebutkan di atas. Sebagai Dasar Negara, Pancasila di tuntutan untuk bersifat statis dan dinamis. Statis karena Pancasila harus relatif tetap, tidak berubah. Dinamis karena Pancasila telah mendorong pengembangan ide-ide dan konsep-konsep pembangunan.

2.1.4 Generasi Z

Generasi Z, sering disingkat sebagai Gen Z, merupakan kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai generasi digital natives yang tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi teknologi canggih dan internet. Oleh karena itu, Gen Z cenderung memiliki keterampilan digital yang tinggi dan mampu mengadopsi teknologi baru dengan cepat. Ketergantungan mereka terhadap teknologi tidak hanya memengaruhi cara mereka berkomunikasi, tetapi juga cara mereka belajar, bekerja, dan mengambil keputusan, terutama dalam konteks konsumsi dan perilaku keuangan.

Salah satu karakteristik utama Gen Z adalah kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka lebih cenderung mengadopsi perilaku konsumen yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, karena mereka mendewakan nilai-nilai seperti keberlanjutan, kesetaraan, dan keadilan sosial (Rofieq et al., 2025) (Alawiyah et al., 2025).

2.1.5 Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Hak warga negara yang dijamin dalam UUD meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Menurut UUD 1945, hak asasi manusia merupakan bagian yang fundamental dan diakui serta

dilindungi oleh hukum, mencakup hak untuk hidup, hak atas pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28). Sementara itu, kewajiban warga negara mencakup membayar pajak sebagai kontribusi utama kepada negara, membela tanah air, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, mematuhi pembatasan peraturan, dan kewajiban lainnya yang diatur dalam undang-undang.

A. Pengertian Hak menurut para ahli

1. Srijanti

Menurut Srijanti, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.

2. Notonegoro

Hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Hak ini juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

B. Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli

1. John Salmond

John Salmond memaknai kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi atau konsekuensi.

2. Notonegoro

kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

C. Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban saling berhubungan erat, di mana pelaksanaan hak satu individu sering kali memerlukan pemenuhan kewajiban dari individu lain atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan harus dilindungi oleh kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang memadai bagi semua warga negaranya (Taupan, 2023).

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945

1. Hak Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak-hak tertentu yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan negara. Di Indonesia, hak-hak tersebut tercantum dalam UUD 1945 dan meliputi:

- a. Hak atas Pendidikan yaitu Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan menjadi tanggung jawab pendidikan (Wicaksono et al., 2022; Husnunnadia & Slam, 2024).
- b. Hak untuk Berekspresi yaitu Warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi tanpa tekanan. Ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Vaniya, 2022).

- c. Hak atas Kesehatan yaitu Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses kesehatan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Ardinata, 2020).
- d. Hak Perlindungan Hukum yaitu Warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara, efektif dalam menghadapi sistem peradilan (Wicaksono et al., 2022).

2. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban seorang warga negara terkait dengan tanggung jawabnya untuk berkontribusi kepada masyarakat dan negara. Beberapa kewajiban tersebut mencakup:

- a. Kewajiban Mematuhi Hukum yaitu Warga negara harus menghormati dan patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk berbagai peraturan yang mengatur perilaku sosial dan politik (Sifa, 2020; (Farahdiba et al., 2021).
- b. Kewajiban Membayar Pajak yaitu Untuk mendukung anggaran negara dan penyediaan layanan publik, setiap individu diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Farahdiba et al., 2021).
- c. Kewajiban Berpartisipasi dalam Pemerintahan yaitu Warga negara memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk hak dan kewajiban untuk melakukan pemilu (Wicaksono et al., 2022).

2.2 Penelitian Yang Relevan

1. Darojah et al (2022) dalam Penelitiannya yang berjudul "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pengembangan Budaya Literasi

Konstitusi" Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran guru dalam mengembangkan budaya literasi Politik di kalangan pelajar, yang sangat relevan dengan tema literasi politik. Dengan fokus pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, studi ini memberikan wawasan tentang pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam membantu siswa memahami konstitusi dan norma politik, yang penting untuk mendukung pembentukan literasi politik di kalangan siswa. (Darajah et al, 2022).

2. Musawwamah dan Taufiqurrahman (2019) dalam Penelitiannya yang berjudul "Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan" Fokus penelitian ini adalah pada penguatan karakter dalam konteks pendidikan, tetapi penelitian ini memberikan pandangan mengenai bagaimana karakter yang dibentuk dalam pendidikan dapat mengarah pada literasi politik dan penguatan sokongan kewarganegaraan. (Musawwamah & Taufiqurrahman, 2019).
3. Nafisah (2025) dalam Penelitiannya yang berjudul "Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kecerdasan Moral Terhadap Peserta Didik Kelas VII SMP PAB 2 Helvetia Kecamatan Labuhan Deli "Penelitian ini meneliti Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kecerdasan moral. Guru Pendidikan Pancasila mengajarkan siswa dalam meningkatkan kecerdasan moral pada siswa. (Nafisah, 2026).
4. Hidayat dan Patras (2020) dalam Penelitiannya yang berjudul "Kepuasan Kerja Guru dan Peran Kepemimpinan Pendidikan" Penelitian ini terfokus pada kepuasan kerja guru dan kurang relevan dalam konteks literasi politik Gen-Z. Namun, menemukan hubungan antara kepemimpinan pendidikan dan hasil

belajar bisa menjadi variabel penting dalam memahami bagaimana literasi politik diajarkan oleh para pendidik.

5. Syukriati (2022) dalam Penelitiannya yang berjudul "Upaya Peningkatan Aktifitas Belajar Pendidikan Pancasila Peserta didik Melalui Metode Jigsaw di SMA Negeri 2 Tebo" Penelitian ini menunjukkan bagaimana metode pembelajaran inovatif dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam Pendidikan Pancasila. Metode ini berkontribusi pada pelatihan siswa dalam analisis isu-isu politik dan pengembangan sikap terhadap demokrasi dan partisipasi, yang relevan dalam konteks pendidikan literasi politik. (Syukriati, 2022).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana Pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk literasi politik generasi Z melalui proses pembelajaran di sekolah.

1. Pendidikan Pancasila sebagai Input Utama

Pendidikan Pancasila menjadi sumber utama yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa.

2. Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Input dari Pendidikan Pancasila kemudian diproses melalui aktivitas pembelajaran di kelas. Proses ini meliputi:

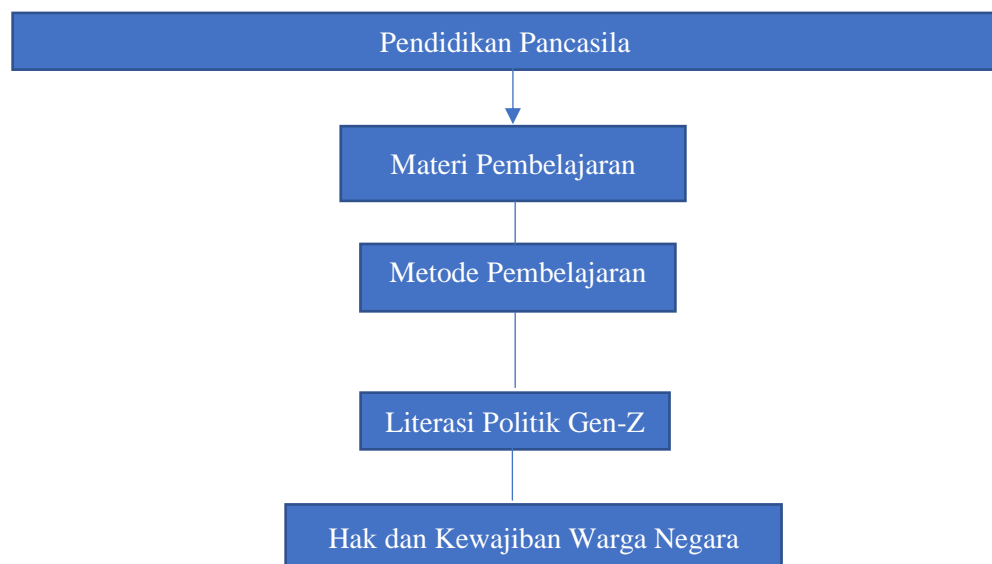
1. Materi Pembelajaran, Siswa menyerap dan memahami Materi

Pembelajaran seperti hak dan kewajiban, Pancasila, demokrasi, toleransi, dan kebangsaan.

2. Metode Pembelajaran, dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru siswa lebih mudah untuk menyerap materi yang diajarkan oleh guru.

3. Literasi Politik Gen-Z sebagai Output

Hasil dari proses pembelajaran Pendidikan Pancasila tercermin dalam literasi politik generasi Z yaitu mengetahui bagaimana peran literasi politik dalam pembentukan literasi politik seperti hak dan kewajiban.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam literasi politik Generasi Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan. Menurut Sugiyono (2013), Pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan dengan kondisi objek alamiah dimana penulis sebagai instrumen kunci penelitian (Ismail Nurdin & 2019) metode kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan berfungsi untuk meneliti kondisi objek secara alamiah tanpa eksperimen, dengan mengutamakan triangulasi data, analisis induktif, serta menekankan makna daripada generalisasi. Data dikumpulkan langsung dari situasi nyata di lapangan melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan otentik.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan menginterpretasikan bagaimana peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk literasi politik Gen-Z berdasarkan pengalaman, persepsi, aktivitas pembelajaran, dan konteks sekolah. Tujuan Penelitian ini Menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Asuhan Daya Medan, Mengidentifikasi peran guru Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran politik siswa Gen-Z dan Menganalisis bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Pancasila

berkontribusi pada pembentukan literasi politik siswa.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan dalam Penelitian ini adalah SMA Asuhan Daya Medan yang terletak di Jalan Pematang Pasir, Gang Wakap, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena sekolah yang bersangkutan merupakan sekolah penugasan saya dalam kegiatan Mata Kuliah PLP 3. Siswa Pada Sekolah tersebut Literasi Poitiknya Rendah Karena Pada Saat Pemaparan Materi yang berkaitan dengan Politik banyak yang tidak Paham dan belum Mengetahui tentang Hak dan Kewajiban tersebut. Dengan Demikian, Peneliti memfokuskan untuk melihat bagaimana Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan Pada bulan Februari hingga selesai. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Februari	Maret	April
1	Observasi Awal			
2	Persiapan Penelitian (Izin Penelitian)			
3	Pengumpulan Data			
4	Analisis Data			
5	Penyusunan Laporan Penelitian			

6	Revisi Skripsi			
7	Sidang Meja Hijau Strata S1			

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam Penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, Ketua Osis, Ketua Paskibra dan Ketua Pramuka di SMA Asuhan Daya Medan.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam Penelitian Ini yaitu Literasi Politik siswa di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, pengumpulan data menjadi salah satu langkah yang penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Data yang digunakan dalam penelitian dapat di bedakan menjadi dua jenis, yakni **data primer** dan **data sekunder**.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama oleh peneliti untuk tujuan spesifik penelitian yang sedang dilakukan. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan Pengamatan langsung terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara Merupakan Proses di mana peneliti melakukan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan informasi mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari sumber yang sudah ada. Ini termasuk data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti lain, Seperti Buku, Jurnal, Artikel dan penelitian Sebelumnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan yang khususnya sebagai pengukuran dan Pengumpulan Data. Adapun Instrumen Penelitian Pada Penelitian ini yaitu berupa Wawancara Mendalam Serta Dokumentasi.

Tabel 3.5 Instrumen Penelitian

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?
2.	Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?
3.	Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?

4.	Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Di Masyarakat?
5.	Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Tidak Valid Atau Hoaks?
6.	Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Politik Dan Kewarganegaraan? Jelaskan.
7.	Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Literasi Politik Di Sekolah Menjadi Lebih Efektif Dan Relevan Dengan Perkembangan Zaman?
8.	Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Di Sekolah?
9.	Bagaimana Pendidikan Pancasila Membantu Siswa Memahami Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?
10.	Menurut Anda, Apakah Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data berdasarkan pendapat (Ahmad and Muslimah, 2021), adalah Usaha menemukan dan mengganti dengan sistematis data hasil

wawancara, observasi, dan lainnya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat peneliti disajikan untuk temuan akan datang. Sehingga dalam upaya meningkatkan pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna. Tujuan utama analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang belum banyak diteliti serta mengidentifikasi karakteristik utama dari interaksi sosial. Secara umum, proses analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) analisis sebelum kerja lapangan, (2) analisis yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kerja lapangan, dan (3) analisis setelah kerja lapangan.

3.6.1 Analisis Sebelum di Lapangan

Menurut (Rozali, 2022), Analisis data dilakukan berdasarkan hasil penelitian awal atau sumber sekunder untuk menetapkan fokus Penelitian. Walaupun begitu, perhatian utama dari penelitian ini bersifat sementara dan diantisipasi akan mengalami kemajuan seiring dengan pelaksanaan pengamatan lapangan oleh para peneliti dan berlanjutnya proses penyelidikan. Setelah peneliti mengevaluasi bahwa informasi yang didapatkan telah memenuhi syarat untuk memahami elemen lingkungan yang menjadi objek penelitian, selanjutnya mereka meninggalkan fase pengumpulan data di lokasi dan pindah ke tahap analisis data yang lebih mendalam.

3.6.2 Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

(Yuniani, 2018), Mengatakan Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah

selesai di lapangan. menyatakan analisis penelitian kualitatif telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data

1. Reduksi Data

Reduksi data menekankan pada pemokusian data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan. Reduksi data mencakup beberapa langkah penting, seperti penyempurnaan analisis, klasifikasi atau kategorisasi data sesuai dengan fokus penelitian, pemadatan informasi, eliminasi elemen yang tidak relevan, serta pengorganisasian data guna mempermudah akses dan verifikasi. Hasil dari proses ini adalah dataset yang lebih terfokus dan relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, mempermudah pengumpulan data tambahan, serta memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap informasi yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya durasi penelitian di lapangan, jumlah data yang terkumpul juga semakin bertambah, yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam analisis. Oleh karena itu, reduksi data menjadi langkah esensial untuk mencegah redundansi informasi dan mengoptimalkan efisiensi dalam proses analisis data.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya dalam proses analisis melibatkan distribusi data, yang memerlukan penyajian informasi secara terstruktur. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir informasi secara sistematis, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang berbasis pada data. Dalam proses ini, data disusun secara strategis untuk memfasilitasi keterhubungan antar informasi, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Berbagai metode dapat digunakan dalam penyajian data, termasuk deskripsi naratif, visualisasi hubungan antar kategori, serta pemanfaatan

3. Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan langkah ke tiga dalam analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara Pada Hari Senin dan Selasa, Tanggal 23 dan 24 Februari 2026, sebagaimana yang diketahui Informan pada penelitian ini yaitu Guru Pendidikan Pancasila, Kepala Sekolah dan Siswa. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul yaitu “Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026”. Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara, Dokumentasi, dan juga observasi. Peneliti memperoleh data berupa jawaban dari Teknik pengumpulan data berupa Wawancara.

Data hasil wawancara Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan yang terdiri dari 10 pertanyaan Kepada Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, Kepala Sekolah dan Siswa SMA Asuhan Daya Medan.

Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Informan yang diwawancarai untuk memperoleh data yang objektif terdiri dari guru Pendidikan Pancasila, Kepala Sekolah, Serta Siswa di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan. Urgensi Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z semakin menonjol di tengah fenomena sosial yang muncul disekolah tersebut yaitu, Kurangnya Pemahaman tentang hak dan

kewajiban warga negara dan proses politik serta kurangnya keterampilan berpikir kritis seperti siswa perlu mengembangkan keterampilan kritis untuk menganalisis informasi politik dan membuat keputusan yang tepat. Literasi politik diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan bernegara dan memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila harus mampu berperan untuk membentuk Literasi politik pada siswa, agar siswa mampu mengintegrasikan pembelajaran Pendidikan Pancasila ke dalam praktik kehidupan Warga Negara.

4.1.1 Profil Sekolah

SMA Asuhan Daya Medan merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang berada di Kota Medan. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, pembinaan karakter, serta pembentukan kepribadian peserta didik agar berkembang secara akademik maupun sosial. Sebagai sebuah sekolah menengah atas, SMA Asuhan Daya Medan menjadi tempat bagi siswa untuk memperoleh pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan nilai, sikap, dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa identitas sekolah tidak semata-mata terletak pada aspek administratif, melainkan juga pada fungsi pendidikan dan pembinaan manusia secara utuh.

A. Identitas Sekolah SMA Asuhan Daya Medan

Adapun Identitas dari sekolah SMA Asuhan Daya Medan yaitu:

1. Nama Sekolah : SMA Asuhan Daya

2. Akreditasi : B
3. NPSN : 10257550 / 304076010259
4. Status : Swasta
5. Jenjang : SMA
6. Desa/Kelurahan : Tanjung Mulia Hilir
7. Kabupaten/Kota : Kota Medan
8. Provinsi : Sumatera Utara
9. Akreditasi : Tahun 2021s/d 2026
10. No.Akreditasi : 490/BAN-SM/SK/2019

B. Visi-Misi Sekolah

Visi dan misi sekolah adalah dua komponen penting yang menjadi dasar bagi setiap institusi pendidikan. Visi sekolah adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sekolah, sedangkan misi sekolah adalah pernyataan yang menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visinya. Visi dan misi sekolah berfungsi sebagai pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan sekolah. Visi dan misi sekolah juga membantu meningkatkan motivasi dan komitmen guru, staf, dan siswa, karena mereka memiliki arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, visi dan misi sekolah juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah, karena sekolah memiliki standar yang jelas untuk diukur. Adapun Visi dan Misi Sekolah SMA Asuhan Daya yaitu:

Visi-Misi Sekolah SMA Asuhan Daya Medan

1. Visi Sekolah

Menciptakan Pelajar Yang Dapat Unggul Dalam Prestasi Yang Berorientasi Iman dan Taqwa.

2. Misi Sekolah

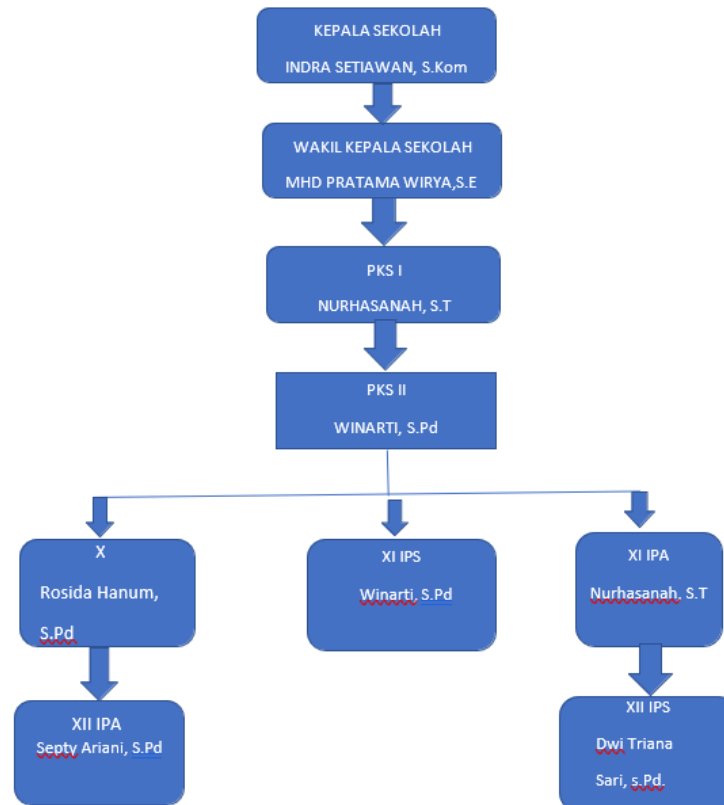
1. Peningkatan Tenaga Pengajar Yang Profesional
2. Melengkapi Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Peningkatan Ekstrakurikuler Yang Dititikberatkan Pada Bidang kerohanian
4. Meningkatkan Minat Baca Siswa

C. Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi adalah bagian yang sangat penting, terutama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu lembaga atau kelompok. Organisasi yang baik di sekolah bertujuan agar semua orang mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang adil sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Karena itu, susunan organisasi di setiap sekolah akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sekolah SMA Asuhan Daya Medan memiliki organisasi sekolah yang dibentuk dalam sebuah struktur untuk membantu mereka menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah struktur organisasi SMA Asuhan Daya Medan:

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Sekolah



D. Data Peserta Didik

Data peserta didik adalah kumpulan informasi tentang siswa yang terdaftar di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Data ini mencakup Jumlah peserta didik pada setiap kelas di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan. Data peserta didik digunakan untuk memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan membuat keputusan yang baik pada proses pembelajaran. Adapun Data Peserta didik di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan yaitu:

Tabel 4.1.1 Data Peserta Didik

Kelas	Jurusan	Siswa	Siswi	Jumlah Seluruhnya
X	IPA/IPS	29	15	44
XI	IPA	8	12	20
	IPS	11	10	21
XII	IPA	6	14	20
	IPS	7	7	14

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penting untuk menunjukkan peralatan di sekolah.

Berikut adalah Sarana dan Prasarana yang ada di SMA Asuhan Daya Medan:

Tabel 4.1. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Ruang	Jumlah Ruang	Kualitas
1	Laboratorium IPA	1 Ruangan	Baik
2	Perpustakaan	1 Ruangan	Baik
3	Kantor Guru	1 Ruangan	Baik
4	Ruang Kepala Sekolah	1 Ruangan	Baik
5	Musholla	1 Ruangan	Baik
6	Toilet Guru	1 Ruangan	Baik
7	Ruang Penjaga Sekolah	1 Ruangan	Baik

8	Kantin Sekolah	1 Ruangan	Baik
9	Kantor Administrasi	1 Ruangan	Baik
10	Toilet Siswa	3 Ruangan	Baik
11	UKS	1 Ruangan	Baik
12	Ruang Peralatan	1 Rungan	Baik
13	Ruang Kelas	6 Ruangan	Baik

4.1.2 Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila tentang Hak dan

Kewajiban dalam Membentuk Literasi Politik Siswa

A. Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara maupun antarwarga negara. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara mempunyai hak yang telah terjamin dan kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Itulah mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Memperhatikan norma dan hukum yang berlaku, maka pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras, artinya tidak bertentangan atau melanggar. Keselarasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman hidup. Serasi artinya sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, setelah bekerja (melaksanakan kewajiban), seseorang berhak mendapatkan upah atau gaji sesuai perjanjian. Seseorang tidak diperbolehkan menuntut haknya terus-menerus, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan

kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras harus didasarkan pada Pancasila yang berisi nilai-nilai moral, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku. Alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras antara lain sebagai berikut.

1. Menghindarkan Diri dari Sikap Egois

Seseorang yang bersikap egois terlalu banyak menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Mengerti dan memahami makna hak dan kewajiban menghindarkan kita dari sikap egois.

2. Menumbuhkan Sikap Toleran

Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kodrat (given) dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan tersebut bukan hanya secara fisik, melainkan juga perbedaan cara pandang dan pendapat yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleran berupa sikap saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. Dengan demikian, kita terhindar dari perilaku diskriminasi.

3. Kesadaran Diri sebagai Bagian dari Masyarakat dan Bangsa Indonesia

Kesadaran diri seseorang membuatnya berhati-hati. Sebelum bertindak, ia akan berpikir terlebih dahulu. Itu merupakan pencegahan supaya tidak melanggar hak orang lain.

4. Supaya Bijak dalam Menggunakan Kekuasaan

Setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik sebagai pemimpin bagi teman, komunitas, keluarga, ataupun masyarakat. Bijak dalam menggunakan pengaruh dan kekuasaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan kedudukan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada banyak pasal lagi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak dan kewajiban. Coba kalian baca dan perhatikan Pasal 27 sampai dengan 34 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah dijamin dalam konstitusi dan aturan hukum di bawahnya, masih saja terdapat pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Adanya kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1. Sikap Egois

Egois berarti mementingkan diri, baik dirinya sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Minimnya rasa menghargai dan menghormati orang lain menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain.

2. Kurangnya Kesadaran

Pemahaman kesadaran terhadap hak dan kewajiban harus dilakukan secara tuntas. Rendahnya kesadaran dapat menimbulkan sikap sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, dan tidak toleran terhadap hak dan kewajiban orang lain sehingga muncul diskriminasi.

3. Merasa Eksklusif

Adanya jabatan, pangkat atau kedudukan, kekayaan, kerabat, bahkan teman dapat membuat seseorang merasa eksklusif atau spesial. Sikap eksklusif tersebut di antaranya ingin dihargai lebih, diperlakukan secara khusus, dan bertindak semaunya sendiri. Tahukah kalian bahwa sikap eksklusif tersebut dapat melanggar hak orang lain dan aturan hukum yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi ibarat pedang bermata dua. Artinya, dapat mendatangkan kemanfaatan, tetapi dapat juga mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, bagi pemilik atau pengendali teknologi diperlukan sikap bijaksana dan taat pada hukum yang berlaku. Penggunaan teknologi industri bagi perusahaan atau pabrik akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Namun, penggunaan teknologi industri juga menghasilkan limbah. Apabila limbah tidak ditangani dengan baik, akan terjadi pencemaran. Pencemaran mengakibatkan terganggunya hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman.

C. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global

Salah satu ciri Pelajar Pancasila ialah berkebinekaan global. Kita hidup di era yang tidak dapat dipisahkan dari pergaulan antarbangsa seiring dengan globalisasi (borderless world). Pelajar yang berkebinekaan global mempunyai tekad untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas serta berpikiran terbuka terhadap budaya lain sehingga tumbuh rasa saling menghargai budaya antarbangsa.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terutama Alinea IV: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." Itu merupakan tujuan nasional yang landasan konstitusional berpartisipasi aktif dalam pergaulan internasional termasuk global. Untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak dan kewajiban secara global. Persahabatan, persaudaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan sikap yang harus kita kembangkan. Meskipun dalam kehidupan global, Pancasila tetap menjadi acuan atau pedoman dalam menghadapi sesuatu. Nilai-nilai Pancasila menjadi suatu kebenaran universal yang dapat diterima oleh setiap bangsa sebagaimana pernah diperkenalkan Presiden Sukarno melalui pidato *To Build The World A New* yang disampaikan di depan Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Berbagai fenomena global yang terjadi menjadi tantangan dalam penerapan ideologi Pancasila.

Beberapa negara memiliki sikap yang berbeda terhadap peredaran narkoba. Ada negara yang bersikap keras dan tegas, namun ada juga yang lemah meresponsnya. Indonesia memandang bahwa penyalahgunaan narkoba harus

diberantas secara tegas karena merugikan dan berbahaya bagi umat manusia. Mengonsumsi narkoba bukanlah hak. Kita dan negara wajib mencegah dan mengatasinya untuk menghindari terjadinya korban. Narkoba secara lebih luas berdampak pada menurunnya mental generasi bangsa.

Perkembangan teknologi *smartphone* (*gawai pintar*) dengan kemudahan akses internet telah membawa dunia dalam satu genggaman. Berbagai konten seperti film, musik, game, video, dan berita telah merambah dalam kehidupan kita. Dalam konten tersebut sering terdapat budaya asing yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengakses konten memang merupakan hak setiap orang, tetapi kita harus mengembangkan karakter dan kecerdasan diri untuk menyaringnya. Jangan sampai karena keasyikan mengakses konten hingga dapat merugikan hak orang lain dan mengganggu hubungan sosial. Dewasa ini banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di luar negeri. Mereka berharap dapat menguasai iptek dan kompetensi secara lebih baik. Belajar dan tinggal di luar negeri memiliki tantangan tersendiri karena langsung bersentuhan dengan budaya negara setempat. Meskipun demikian, kalian harus berlatih bijak dalam beradaptasi. Memilih sikap berdasarkan budaya tertentu merupakan hak, namun janganlah nilai-nilai keindonesiaan sampai luntur dan berganti menjadi budaya asing.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Literasi Politik Siswa

Berdasarkan hasil observasi langsung serta wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Pancasila dan siswa

di SMA Asuhan Daya Medan, ditemukan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila memegang peranan yang sangat signifikan dalam Pembentukan Literasi Politik Siswa. Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian materi ajar semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu membentuk Literasi Politik tentang cara pandang hidup siswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk literasi politik Gen-Z di SMA Asuhan Daya Medan. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran Pendidikan Pancasila:

A. Menumbuhkan Pemahaman Dasar tentang Demokrasi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, serta Sistem Politik

Pendidikan Pancasila membantu siswa memahami konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem politik yang berlaku di Indonesia. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, siswa diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, keadilan, musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pemahaman ini penting agar siswa tidak melihat politik sebagai sesuatu yang kotor atau hanya milik elit, melainkan sebagai bagian dari kehidupan bersama yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Dengan demikian, Pendidikan Pancasila membantu siswa memahami bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki identitas kewarganegaraan, tetapi juga soal memahami peran, tanggung jawab, dan hak-hak politik yang melekat pada diri mereka. Pemahaman dasar ini menjadi

fondasi penting bagi terbentuknya literasi politik, sebab siswa yang memahami demokrasi dan sistem politik akan lebih siap untuk menafsirkan peristiwa politik secara rasional dan tidak mudah terseret opini tanpa dasar.

B. Membentuk Sikap Sosial yang Menghargai Perbedaan Pendapat dan Toleransi

Pendidikan Pancasila membantu siswa membentuk sikap sosial yang menghargai perbedaan pendapat dan toleransi, Siswa belajar untuk menghormati perbedaan pendapat dan memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan, Mereka juga belajar untuk menjadi toleran terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya.

Literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut sikap sosial dan budaya politik. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar mampu menghargai perbedaan pendapat, menerima keberagaman, dan menjaga sikap toleran dalam kehidupan sosial maupun politik. Sebagai generasi yang aktif di media sosial, Gen-Z sering terlibat dalam ruang diskusi yang penuh dengan perdebatan, polarisasi, bahkan konflik verbal. Dalam situasi seperti ini, Pendidikan Pancasila hadir untuk menanamkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari realitas demokrasi. Siswa diajarkan untuk memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal politik.

Di lingkungan SMA Asuhan Daya Medan yang kemungkinan juga memiliki keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan pemikiran,

pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat mendorong siswa untuk menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas, tidak memaksakan pandangan politik kepada orang lain, bersikap santun dalam berargumen, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Sikap ini sangat penting karena literasi politik yang sehat tidak hanya ditandai oleh kemampuan berbicara soal politik, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menyikapi perbedaan politik secara etis dan toleran. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila membantu membentuk budaya politik demokratis di kalangan siswa.

C. Meningkatkan Pemahaman tentang Proses Politik dan Partisipasi Warga Negara

Peran penting berikutnya dari Pendidikan Pancasila adalah membantu siswa memahami bahwa politik bukan hanya soal pemilu atau partai politik, melainkan mencakup proses pengambilan keputusan publik, penyusunan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan keterlibatan warga negara dalam kehidupan bernegara.

Pendidikan Pancasila membantu siswa memahami proses politik dan partisipasi warga negara, Siswa belajar tentang proses pembuatan kebijakan, Mereka juga memahami pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik. Banyak siswa pada usia sekolah menengah sering memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal, berbagai kebijakan pemerintah seperti pendidikan, bantuan sosial, aturan sekolah, harga kebutuhan pokok, bahkan akses internet, semuanya berkaitan dengan keputusan politik.

Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila membantu siswa memahami bahwa politik hadir dalam kehidupan sehari-hari dan memengaruhi masa depan mereka.

Dalam proses pembelajaran, siswa dapat dikenalkan pada bagaimana kebijakan publik dibuat, bagaimana aspirasi masyarakat disalurkan, bagaimana pemimpin dipilih, serta bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi ini tidak selalu harus berbentuk memilih dalam pemilu, tetapi juga bisa berupa mengikuti organisasi sekolah, aktif dalam musyawarah kelas, menyampaikan aspirasi secara santun, ikut dalam kegiatan sosial, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu masyarakat.

Bagi siswa SMA Asuhan Daya Medan, pengalaman seperti pemilihan ketua OSIS, diskusi kelas, dapat menjadi latihan awal dalam memahami praktik demokrasi dan partisipasi politik. Dari sini terlihat bahwa Pendidikan Pancasila tidak hanya memberi teori, tetapi juga mendorong siswa untuk belajar menjadi warga negara aktif. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berkontribusi pada pembentukan literasi politik dengan cara menghubungkan pengetahuan politik dengan pengalaman partisipatif siswa dalam kehidupan nyata.

D. Menumbuhkan Nilai Moral dan Etika dalam Aktivitas Politik

Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik saat ini adalah melemahnya etika politik, yang tampak dalam praktik korupsi, manipulasi informasi, politik uang, ujaran kebencian, fitnah, dan rendahnya tanggung jawab moral dalam ruang publik. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting karena membekali siswa bukan hanya dengan

pengetahuan politik, tetapi juga dengan nilai moral dan etika yang menjadi landasan perilaku politik yang baik.

Melalui Pendidikan Pancasila, siswa diajarkan bahwa politik yang sehat harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas, kepedulian terhadap kepentingan umum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini penting agar siswa tidak tumbuh menjadi generasi yang melihat politik semata-mata sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi sebagai sarana pengabdian, pelayanan, dan perjuangan untuk kepentingan bersama.

Di SMA Asuhan Daya Medan, Pendidikan Pancasila dapat berperan dalam membangun kesadaran bahwa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepemimpinan, organisasi, maupun pengambilan keputusan, siswa harus menjunjung tinggi etika. Misalnya: jujur saat mengikuti pemilihan organisasi, adil dalam mengambil keputusan kelompok, bertanggung jawab terhadap amanah jabatan, dan tidak memanipulasi informasi demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik yang dibentuk melalui Pendidikan Pancasila bukan hanya literasi kognitif, tetapi juga literasi moral, yaitu kemampuan memahami politik secara benar sekaligus mempraktikkannya secara etis.

Pendidikan Pancasila membantu siswa menumbuhkan nilai moral dan etika dalam aktivitas politik. Siswa belajar tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas politik.

E. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Informasi Politik

di Media Sosial

Pendidikan Pancasila tidak hanya bertugas untuk memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dan teladan dalam pembentukan Literasi Politik Dalam proses pembelajaran, Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila secara aktif mengaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan siswa, seperti menggunakan hak politik, menumbuhkan kesadaran untuk siswa menghormati orang lain, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar dapat tumbuh sebagai individu yang memiliki pemahaman literasi politik yang tinggi, serta mampu menyesuaikan diri secara positif dalam berbagai lingkungan baik di sekolah, di tengah keluarga, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep Pendidikan Pancasila memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal yang harus dimiliki setiap warga negara dan pada akhirnya mampu menjalankan perannya dalam negara demokratis.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila Memiliki Dampak Positif Terhadap Perubahan Sikap Dan Pemahaman Siswa. Siswa Menunjukkan

Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Dalam Isu-Isu Sosial Dan Politik, Serta Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Analisis Informasi Politik.

Pendidikan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membentuk literasi politik peserta didik, khususnya Generasi Z (Gen-Z) yang hidup di tengah perkembangan teknologi digital, arus informasi yang sangat cepat, dan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Di lingkungan sekolah seperti SMA Asuhan Daya Medan, Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang menyampaikan konsep-konsep normatif kenegaraan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kesadaran politik, sikap demokratis, karakter kewarganegaraan, dan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap berbagai persoalan publik.

Gen-Z dikenal sebagai generasi yang sangat dekat dengan internet, media sosial, dan berbagai platform digital. Kondisi ini membuat mereka lebih cepat terpapar isu-isu politik, baik yang bersifat edukatif maupun yang bersifat manipulatif seperti hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila menjadi penting karena berperan sebagai filter nilai, pembimbing intelektual, dan pembentuk karakter politik siswa agar mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga menjadi warga negara muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Di era digital, media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi bagi Gen-Z. Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, terdapat tantangan besar berupa hoaks politik, propaganda, disinformasi, framing media, buzzer politik, dan narasi provokatif yang dapat memengaruhi cara berpikir

siswa. Oleh karena itu, salah satu peran Pendidikan Pancasila yang sangat relevan saat ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap informasi politik yang beredar di ruang digital. Melalui Pendidikan Pancasila, siswa dapat dibimbing untuk membedakan fakta dan opini, mengenali sumber informasi yang kredibel, memahami motif di balik penyebaran informasi politik, menganalisis isi pesan politik secara objektif, serta menghindari perilaku menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di SMA Asuhan Daya Medan, kemampuan ini sangat penting karena sebagian besar siswa Gen-Z kemungkinan aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, atau WhatsApp yang sering menjadi ruang penyebaran informasi politik. Tanpa kemampuan berpikir kritis, siswa akan mudah terpengaruh oleh opini viral, ikut menyebarkan hoaks, bersikap fanatik tanpa dasar pengetahuan, atau bahkan membentuk sikap politik berdasarkan emosi semata.

Dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang tepat, siswa dapat diarahkan untuk menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, yaitu generasi yang mampu menggunakan media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai ruang belajar politik yang sehat dan beretika.

4.2.2 Peran guru Pendidikan Pancasila di dalam Kelas

1. Guru sebagai Pengajar

Dalam kapasitasnya sebagai pengajar, guru memiliki tanggung jawab utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan mencerdaskan peserta didik. Namun lebih dari sekadar penyampaian materi, guru juga turut andil dalam

membentuk literasi politik siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

2. Guru sebagai Pembimbing

Sebagai pembimbing, guru berperan dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini sangat penting mengingat guru adalah sosok yang memiliki kedekatan langsung dengan siswa dalam keseharian mereka di sekolah. Dengan bimbingan yang tepat, guru dapat mengarahkan siswa untuk memahami norma-norma sosial dan etika, serta membangun kesadaran moral yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di tengah masyarakat.

3. Guru sebagai Ilmuwan

Guru juga dituntut untuk menjadi ilmuwan, yakni individu yang terus menggali, mengembangkan, dan membagikan ilmu pengetahuan kepada siswa secara komprehensif dan bertanggung jawab. Untuk menjalankan peran ini, guru harus memiliki penguasaan yang baik terhadap materi ajar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu menyajikan pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Dengan demikian, guru dapat memfasilitasi proses belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun pemikiran kritis dan logis siswa.

4.2.3 Metode Pembelajaran yang digunakan Guru Pendidikan Pancasila di dalam Kelas

Pada Proses Pembelajaran Guru Menggunakan Metode Pembelajaran agar siswa mudah mampu berpartisipasi aktif saat Proses Pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi proses belajar siswa, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa. Metode pembelajaran dapat berupa pendekatan, strategi, teknik, atau taktik yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Pancasila dan Siswa di sekolah SMA Asuhan Daya Medan, Guru Pendidikan Pancasila menggunakan Metode Pembelajaran yang digunakan oleh Guru Pendidikan Pancasila selama proses pembelajaran dikelas yaitu Diskusi.

1. Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berbagi dan mendiskusikan pandangan mereka tentang isu politik dan kewarganegaraan. Tujuan dari diskusi terbuka adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu politik dan kewarganegaraan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Dalam diskusi terbuka, siswa didorong untuk berbagi pandangan, mendengarkan pendapat orang lain, dan mempertimbangkan berbagai perspektif, diskusi terbuka dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menjadi warga negara yang lebih aktif dan partisipatif.

2. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berbagi dan mendiskusikan pandangan mereka tentang isu politik dan kewarganegaraan dalam kelompok kecil. Tujuan dari diskusi kelompok adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu politik dan kewarganegaraan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi.

Dalam diskusi kelompok, siswa didorong untuk berbagi pandangan, mendengarkan pendapat orang lain, dan mempertimbangkan berbagai perspektif.

4.2.4 Peran Pendidikan Pancasila dalam membantu Siswa Memahami Isu Isu Politik terkait dengan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila memiliki peran yang andil dalam membantu siswa memahami Isu-Isu Politik terkait dengan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara. Mata Pelajaran ini membantu siswa:

1. Menyadari Hak sebagai Warga Negara, seperti Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebebasan.

Menyadari hak sebagai warga negara berarti memahami dan mengakui hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara, Hak atas pendidikan berarti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses ke pendidikan tanpa diskriminasi. Hak atas kesehatan berarti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan akses ke fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi.

2. Memahami Pentingnya Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban berarti memahami bahwa setiap hak yang dimiliki oleh warga negara harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Kewajiban sebagai warga negara meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

3. Mempersiapkan Warga Negara yang dapat Berperan Aktif dalam Masyarakat

Mempersiapkan warga negara yang dapat berperan aktif dalam masyarakat berarti memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga negara. Warga negara yang dapat berperan aktif dalam masyarakat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

4. Memahami Hak-Hak sebagai Warga Negara, seperti Hak atas Pendidikan, Kebebasan Berpendapat, dan Perlindungan dari Diskriminasi

Hak atas pendidikan berarti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses ke pendidikan tanpa diskriminasi, selain itu, Hak atas kebebasan berpendapat berarti setiap warga negara memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berasosiasi tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi. Selain itu, Perlindungan dari diskriminasi berarti setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap dan pemahaman siswa. Siswa menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu sosial dan politik, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analisis informasi politik. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila efektif dalam membentuk literasi politik siswa. Hanya saja Guru harus lebih sering untuk melakukan diskusi agar nantinya siswa siswi lebih mempunyai daya pikir yang lebih kritis dalam memahami isu-isu politik seperti hak dan kewajiban warga negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila memegang peranan yang sangat signifikan dalam Pembentukan Literasi Politik Siswa. Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian materi ajar semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu membentuk Literasi Politik tentang cara pandang hidup siswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti Menumbuhkan Pemahaman Dasar tentang Demokrasi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, serta Sistem Politik, Membentuk Sikap Sosial yang Menghargai Perbedaan Pendapat dan Toleransi, Meningkatkan Pemahaman tentang Proses Politik dan Partisipasi Warga Negara, Menumbuhkan Nilai Moral dan Etika dalam Aktivitas Politik, Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Informasi Politik di Media Sosial. Pembelajaran politik dan kewarganegaraan memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap dan pemahaman siswa. Siswa menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu sosial dan politik, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analisis informasi politik. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila efektif dalam membentuk karakter dan meningkatkan literasi politik siswa.
- b. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila tidak terlepas dari Peran Guru dalam

Proses Pembelajaran di kelas. Dalam Proses Pembelajaran di kelas Guru sebagai Pengajar, Pembimbing dan sebagai Ilmuan. Dalam kapasitasnya sebagai pengajar, guru memiliki tanggung jawab utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan mencerdaskan peserta didik. Namun lebih dari sekadar penyampaian materi, guru juga turut andil dalam membentuk literasi politik siswa.

c. Metode Pembelajaran Yang Digunakan Oleh Guru Pendidikan Pancasila Di Dalam Kelas Yaitu Diskusi Terbuka Dan Diskusi Kelompok

Metode pembelajaran ini melibatkan diskusi interaktif antara siswa dalam kelompok kecil. Metode pembelajaran ini melibatkan diskusi interaktif antara siswa dalam kelompok kecil. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, berpikir kritis, dan memecahkan masalah bersama. Guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing diskusi agar tetap relevan dan berjalan dengan baik.

Metode ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, berpikir kritis, dan memecahkan masalah bersama. Guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing diskusi agar tetap relevan dan berjalan dengan baik. Metode ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. siswa didorong untuk berbagi pandangan, mendengarkan pendapat orang lain, dan mempertimbangkan berbagai perspektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026, penulis menyampaikan beberapa saran di akhir penulisan ini. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat serta bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, baik bagi pihak sekolah, guru, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas Pembentukan Literasi Politik Siswa, antara lain:

- a. Saran kepada Guru, Fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami isu-isu politik dan kewarganegaraan dan Gunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran.
- b. Saran kepada Siswa, Aktif dalam proses pembelajaran jangan ragu untuk bertanya atau berpendapat, Kembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu politik dan kewarganegaraan, Gunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan aksesibilitas dan Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di sekolah dan masyarakat.
- c. Saran kepada Sekolah, Dukung pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila yang relevan dan kontekstual dan Beri kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di sekolah dan masyarakat.
- d. Saran kepada Orang Tua, Dukung pendidikan anak dan berpartisipasi dalam

proses pembelajaran dan Beri kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik di sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan bahwa peran Pendidikan Pancasila dalam pembentukan literasi politik Gen Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan dapat lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, A. (2019). Psikologi Pendidikan Karakter. Remaja Rosdakarya.
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(3), 375-385. Aswita et al., hal. 1. 2 Abd Mannan et al., Pendidikan Literasi (Yogyakarta: Selat Media Partners, 2023), hal. 2. 3
- Aziizu, B. Y. A. (2015). Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 295–300. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13540>
- Darajah et al. "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pengembangan Budaya Literasi Konstitusi" (2022) <https://doi:10.56393/melior.v1i1.128.publikasi:artikel>.
- Fadillah, F., Muzaffarsyah, T., Abdullah, T., & Zulhilmi, Z. (2025). Literasi politik generasi z pada pemilu tahun 2024: studi pemilihan legislatif di kota lhokseumawe. *JPGA*, 1(1), 33-42. <https://doi.org/10.69548/jpga.v1i1.12.2025>
- Fairuzabadi, M. (2021). Teknik Wawancara. <https://Fairuzelsaid.Upy.Ac.Id/Mpti/Teknik-Wawancara/>
- Farikiansyah, I., Salamah, M., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F., & Gufron, M. (2024). Meningkatkan partisipasi pemilu melalui literasi politik pemuda milenial dalam Pendidikan Pancasila. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512-6523. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Fatmawati "Strategi Mengembangkan Kemandirian Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan" (2023) doi:10.56393/decive.v3i3.1852, publikasi: artikel.
- Gun Gun Heryanto, *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hal. 232.
- Handayani, L. (2023). *Political literacy to the community through digital literacy program at the electoral commission of Palembang city*. *Ampera a Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 4(02), 62-69. <https://doi.org/10.19109/ampera.v4i02.14336>
- Hapid, A. (2021). Abd hafid-resume htn.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2tqzw>
- Hartono, H. (1992). Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.

- Heryanto, Literasi Politik; *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, hal.89
- Hidayat dan Patras "KEPUASAN KERJA GURU DAN PERAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN" (2020) doi:10.26877/jmp.v9i1.6835, publikasi: artikel.
- Katarudin, H. and Putri, N. (2020). Pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilukada kota pariaman tahun 2018. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 70-79. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.136>
- Liana. (2016). *Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Deepublish.
- Maulana Arafat Lubis, M. P. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pendidikan Pancasila) di SD\MI Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0*.
- Miles, MB dan AM Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE. Beverly Hills.
- Muchtarom, M., Kurniawan, D., & Rochmadi, R. (2019). Internalisasi Nilai Karakter melalui PPKn. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 45–58.
- Musawwamah dan Taufiqurrahman (2019). Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan" doi:10.19105/nuansa.v16i1.2369, publikasi: artikel.
- Novianti, E., Firmansyah, Y., & Susanto, E. (2020). Peran guru Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai evaluator dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. *CIVICS:Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 112–116. <https://doi.org/10.36805/civics.v5i2.1337>
- Nugroho, B.S., & Hastuti, D. (2017). Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 44–56. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/15282>
- Nurdin, I., & Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id>
- Rochimudin, & dkk. (2023). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Sartika, F. and Parasari, N. (2024). Pendidikan politik bagi pemilih pemula pada pemilu 2024 di desa dangin puri kangin. *Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 57-61. <https://doi.org/10.53008/abdimas.v5i1.3523>
- Salsabila, Z. P., & Nisa, N. R. (2022). Tugas , Fungsi dan Peran Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 9–11. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.327>
- Subdirektorat Statistik Politik Keamanan. (2019). *Statistik Politik 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Syukriati. (2022). Upaya Peningkatan Aktifitas Belajar Pendidikan Pancasila Peserta Didik Melalui Metode Jigsaw Di Sma Negeri 2 Tebo. doi:10.51878/paedagogy.v2i2.1285, publikasi: artikel.
- Suryana et al. (2022). Penerapan Regresi Generalized Poisson Pada Valuasi Ekonomi Objek Agrowisata. doi:10.34123/jurnalasks.v14i1.384, publikasi: artikel.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Weckesser, A., & Denny, E. (2022). BJOG Perspectives – qualitative research: analysing data and rigour. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 129(8), 1406–1407. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17148>
- Waruwu, et al. (2024). Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Utara Operation of the E-Archive Application System in Maximizing the Operation Management of Digital-Based Incoming and Outgoing Mail Services At the Communication and Information Office of North. *Jurnal Emba*, 12(1), 1044–1051.
- Winataputra, U. S. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembudayaan Nilai Pancasila. *Jurnal PKn Progresif*, 11(2), 78–91. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpkn/article/view/13789%0A%0A>
- Yamin, M., & Muslich, M. (2020). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Civic Education*, 9(2), 99–108. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jce/article/view/30519>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1**Hasil Wawancara****Nama : Dra. Sumarni****Tempat : SMA Asuhan Daya Medan****Tanggal : Senin, 23 Februari 2026**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?	Peran Pendidikan Pancasila yaitu Memberi Pemahaman Teoritis Tentang Hak Dan Kewajiban Sesuai Dengan UUD 1945 Dan Peraturan Perundangan Perundangannya.
2.	Menurut Anda, Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?	Dengan Mengintegrasikan Materi Lengkap Nilai Nilai Pancasila, Sistem Pemerintahan, Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.
3.	Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Guru Untuk Meningkatkan	Dengan Cara Diskusi Terbuka Untuk

	Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?	Mengeksplorasi Berbagai Pandangan Tentang Isu Politik Dan Kewarganegaraan.
4.	Menurut Anda, Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Dimasyarakat?	Mendorong Berpikir Kritis Dengan Cara Mengajarkan Siswa Untuk Memverifikasi Sumber Informasi Dengan Memeriksa Kredibilitas Informasi Politik tersebut.
5.	Menurut Anda, Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Valid Atau Hoaks?	Agar mampu membedakan yaitu dengan Mendengar Lokakarya Khusus Tentang Literasi Dan Mengajarkan Langkah Langkah Praktis Memeriksa Kebenaran Informasi.
6.	Menurut Anda, Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah	Ya, Terdapat Perubahan Yang Signifikan

	Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Literasi Politik Dan Kewarganegaraan?	Sebelum Mendapatkan Pembelajaran Karena Sebagian Siswa Cenderung Kurang Memperhatikan Isu Politik Dan Menganggap Tidak Relevan Dengan Diri Mereka.
7.	Menurut Anda, Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Pancasila Disekolah Menjadi Lebih Efektif Dengan Perkembangan Zaman?	Mengintegrasikan Teknologi Dalam Pembelajaran Seperti Menggunakan Platform Berita Terpercaya Lain.
8.	Menurut Anda, Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Disekolah?	Memahami Bahwa Hak Dan Kewajiban Adalah Dua Sisi Yang Tidak Dapat Dipisahkan Setelah Mendapat Pendidikan Sekolah Mereka Menyadari Bahwa Hak Sebagai Warga Negara Seperti Hak Untuk Pendidikan,

		Kesehatan Dan Kebebasan.
9.	Menurut Anda, Bagaimana Pendidikan Disekolah Membantu Siswa Memahami Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?	Melalui Pembelajaran Tentang Nilai-Nilai Pancasila Uud 1945 Dan Contoh Dalam Kehidupan Sehari Hari.
10.	Menurut Anda, Apakah Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?	Ketika Siswa Memahami Kehendak Mereka, Mereka Lebih Berani Menyampaikan Pendapat, Mengakses Layanan Politik Yang Mereka Berhak Dapatkan Dan Mengalokasi Hal Hal Yang Bermanfaat Pada Masyarakat.

Tabel Hasil Wawancara Informan 1

Nama : Indra Setiawan, S.Kom

Tempat : SMA Asuhan Daya Medan

Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?	Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Secara Langsung Dikelas Dan Melakukan Simulasi Demokrasi.
2.	Menurut Anda, Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?	Yaitu Dengan Berfokus Untuk Meningkatkan Literasi Politik Siswa Dilakukan Melalui Pembentukan Nalar Kritis, Pemahaman Hak Dan Kewajiban Serta Simulasi Demokratis.
3.	Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?	Yaitu Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Bersifat Interaktif Dan Kontekstual Seperti

		Diskusi Studi Kasus Berbasis Proyek
4.	Menurut Anda, Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Dimasyarakat?	Sekolah Mengarahkan Siswa Untuk Membedakan Informasi Politik Melalui Penguatan Literasi Media, Berpikir Kritis Dan Etika Komunikasi.
5.	Menurut Anda, Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Valid Atau Hoaks?	Sekolah Mengarahkan Siswa Untuk Membedakan Informasi Politik Melalui Penguatan Literasi Media Dan Berpikir Kritis.
6.	Menurut Anda, Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Literasi Politik Dan Kewarganegaraan?	Pasti Membawa Perubahan Yang Signifikan Pada Siswa, Seperti Perubahan Dari Siswa Yang Tadinya Apatis Menjadi Partisipatif Dan

		Ketajaman Menerima Informasi Politik Jadi Meningkat.
7.	Menurut Anda, Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Pancasila Disekolah Menjadi Lebih Efektif Dengan Perkembangan Zaman?	Pendidikan Pancasila Di Sekolah Perlu Mengadopsi Pendekatan Yang Lebih Praktis Berbasis Digital Dan Responsive Terhadap Isu Kontemporer.
8.	Menurut Anda, Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Disekolah?	Pendidikan Sekolah Menjadi Pondasi Utama Untuk Memahami Partisipasi Mereka Sebagai Warga Negara Namun Hasil Akhirnya Bergeser Bahwasanya Pendidikan Pancasila Menjadi Menghafal Teks Dan Kesadaran Praktis.
9.	Menurut Anda, Bagaimana Pendidikan Disekolah Membantu Siswa Memahami	Pendidikan Disekolah Berfungsi Sebagai Laboratorium Sosial

	Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?	Dimana Siswa Belajar Bahwa Hak Tidak Jatuh Dari Langit Secara Cuma Cuma, Melainkan Dari Kontrol Sosial Yang Melewatkan Tanggung Jawab.
10.	Menurut Anda, Apakah Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?	Tentu Saja Sangat Berpengaruh, Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban Bukan Sekedar Materi Melainkan Umpan Yang Menentukan Bagaimana Seorang Siswa Berperilaku Ketika Siswa Berada Di Dalam Gerbang Sekolah Dan Berinteraksi Dengan Masyarakat.

Tabel Hasil Wawancara Informan 2

Nama : Hadi Romeo Pratama

Tempat : SMA Asuhan Daya Medan

Tanggal : Senin, 23 Februari 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?	Yaitu Melalui Pembiasaan Disiplin Dan Lingkungan Yang Demokratis.
2.	Menurut Anda, Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?	Dengan Melakukan Pembentukan Karakter Dan Pemahaman Nilai Demokrasi.
3.	Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?	Dengan Diskusi Kelompok.
4.	Menurut Anda, Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Dimasyarakat?	Dengan Menganalisis Berita.
5.	Menurut Anda, Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu	Caranya Dengan Verifikasi Sumber Berita

	Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Valid Atau Hoaks?	Terlebih Dahulu, Cek Fakta Menggunakan Situs Resmi.
6.	Menurut Anda, Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Literasi Politik Dan Kewarganegaraan?	Ya, Pendidikan Pancasila Sangat Berperan Dalam Membentuk Karakter.
7.	Menurut Anda, Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Pancasila Disekolah Menjadi Lebih Efektif Dengan Perkembangan Zaman?	Perlu Berbasis Pada Pembelajaran Interaktif Kontekstual Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Penguatan Berpikir Kritis.
8.	Menurut Anda, Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Disekolah?	Meningkat Secara Signifikan Setelah Mendapatkan Pendidikan Dan Mencakup Keseimbangan Antara Mendapatkan Layanan Berkualitas (Hak) Dan Mematuhi Aturan Atau

		Menghormati orang Lain (Kewajiban).
9.	Menurut Anda, Bagaimana Pendidikan Disekolah Membantu Siswa Memahami Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?	Menanamkan Pemahaman Bahwa Kewajiban Harus Didahulukan Daripada Hak Melalui Simulasi Kedisiplinan, Aturan Sekolah Dan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.
10.	Menurut Anda, Apakah Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?	Siswa Yang Memahami Hak Dan Kewajiban Warga Negara Cenderung Lebih Sadar Akan Peran Mereka Dalam Masyarakat Dan Lebih Siap Untuk Mengambil Peran Dalam Menjaga Kepentingan Umum.

Tabel Hasil Wawancara Informan 3

Nama : Putri Aulia

Tempat : SMA Asuhan Daya Medan

Tanggal : Senin, 23 Februari 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?	Dengan Memberikan Pengajaran Yang Tujuannya Memahami Hak Hak Mereka Dan Memiliki Rasa Bertanggung Jawab Akan Kewajibannya Sebagai Siswa.
2.	Menurut Anda, Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?	Dengan Mengaplikasikan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Menjadi Etika Politik Serta Mengembangkan Pemahaman Kemampuan Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban.

3.	Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?	Dengan Cara Diskusi Kelompok Menganalisis Mengenai Isu-Isu Politik.
4.	Menurut Anda, Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Dimasyarakat?	Melalui Pembelajaran Berbasis Diskusi Dan Debat Serta Pemanfaatan Berita Politik Dalam Kegiatan Pembelajaran.
5.	Menurut Anda, Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Valid Atau Hoaks?	Dengan Cara Lebih Memperhatikan Lagi Langkah Siswa Dalam Mencari Informasi Politik Di Berbagai Media.
6.	Menurut Anda, Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Literasi Politik Dan Kewarganegaraan?	Pasti Ada Perubahan Yaitu Bagaimana Cara Memahami Hak Dan Kewajiban Serta Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Politik Dan Kewarganegaraan.

7.	Menurut Anda, Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Pancasila Disekolah Menjadi Lebih Efektif Dengan Perkembangan Zaman?	Membuat Metode Pembelajaran Lebih Interaktif, Mengajak Siswa Untuk Berfikir Kritis Dan Menggali Informasi Politik Diberbagai Media Sosial.
8.	Menurut Anda, Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Disekolah?	Mempersiapkan Dan Membekali Warga Negara Sebagai Generasi Bangsa Yang Dapat Berperan Aktif Dalam Masyarakat.
9.	Menurut Anda, Bagaimana Pendidikan Disekolah Membantu Siswa Memahami Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?	Melalui Tata Tertib Disiplin, Pembelajaran Aktif Dan Simulasi Kehidupan Bermasyarakat.
10.	Menurut Anda, Apakah Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?	Sangat Berpengaruh Karena Pemahaman Ini Membentuk Karakter , Mendorong Tanggung Jawab Sosial Dan

		Memotivasi Siswa Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Bermasyarakat.
--	--	---

Tabel Hasil Wawancara Informan 4

Nama : Raditya

Tempat : SMA Asuhan Daya Medan

Tanggal : Senin, 23 Februari 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut anda, Bagaimana Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menumbuhkan Pemahaman Siswa Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara?	Pendidikan Pancasila Membantu Siswa Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Tentang Isu-Isu Politik Dan Sosial, Sehingga Mereka Dapat Membuat Keputusan Yang Tepat Tentang Hak Dan Kewajiban Mereka.
2.	Menurut Anda, Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Mendukung Peningkatan Literasi Politik Siswa?	Dengan Melakukan Pembelajaran Berbasis Proyek Terkait Dengan Isu-Isu Politik Dan Sosial, Seperti Kampanye Kesadaran Politik, Debat Politik, Atau Pembuatan Video Tentang Hak Dan

		Kewajiban Warga Negara.
3.	Menurut Anda, Metode Pembelajaran Apa Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Guru Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Isu-Isu Politik Dan Kewarganegaraan?	Dengan Melakukan Diskusi Kelompok Dikelas.
4.	Menurut Anda, Bagaimana Sekolah Atau Guru Mendorong Siswa Untuk Berpikir Kritis Terhadap Informasi Politik Yang Berkembang Dimasyarakat?	Sekolah Mendorong Siswa Dengan Pembelajaran Berbasis Diskusi Dikelas.
5.	Menurut Anda, Bagaimana Cara Sekolah Mengarahkan Siswa Agar Mampu Membedakan Informasi Politik Yang Benar Dengan Informasi Yang Valid Atau Hoaks?	Siswa Diajarkan Untuk Memverifikasi Sumber Informasi Sebelum Mempercayainya.
6.	Menurut Anda, Apakah Terdapat Perubahan Sikap Atau Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Literasi Politik Dan Kewarganegaraan?	Ya, Siswa Jadi Lebih Aware Tentang Isu-Isu Sosial Dan Politik Disekitar Mereka.
7.	Menurut Anda, Upaya Apa Yang Perlu Dilakukan Agar Pendidikan Pancasila Disekolah Menjadi Lebih Efektif Dengan Perkembangan Zaman?	Menghubungkan Materi Pendidikan Pancasila Dengan Isu-Isu Aktual

		Dan Kontekstual Yang Dihadapi Siswa.
8.	Menurut Anda, Bagaimana Pemahaman Warga Sekolah Mengenai Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Setelah Mendapatkan Pendidikan Disekolah?	Warga Sekolah, Terutama Siswa, Diharapkan Memahami Hak-Hak Mereka Sebagai Warga Negara, Seperti Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan Berpendapat, Dan Hak Atas Perlindungan Dari Diskriminasi.
9.	Menurut Anda, Bagaimana Pendidikan Disekolah Membantu Siswa Memahami Pentingnya Menjalankan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Sebagai Warga Negara?	Mengajarkan Siswa Untuk Memahami Bahwa Hak Dan Kewajiban Adalah Dua Sisi Yang Tidak Dapat Dipisahkan, Dan Bahwa Menjalankan Kewajiban Adalah Langkah Penting Untuk Mendapatkan Hak.

10.	Menurut Anda, Apakah Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berpengaruh Terhadap Sikap Dan Partisipasi Siswa Dalam Kehidupan Bermasyarakat?	Siswa Yang Memahami Hak-Hak Mereka Sebagai Warga Negara Cenderung Lebih Aktif Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mereka Dan Masyarakat.
-----	---	---

Tabel Hasil Wawancara Informan 5

Lampiran 2**Dokumentasi Wawancara**

Wawancara dengan Guru Pendidikan Pancasila (Ibu Dra. Sumarni)

Dokumentasi Wawancara Informan 1

Wawancara dengan Kepala Sekolah (Bapak Indra Setiawan, S.Kom)

Dokumentasi Wawancara Informan 2



Wawancara dengan Siswa/Ketua Osis (Hadi Rome0)

Dokumentasi Wawancara Informan 3



Wawancara dengan Siswa/Ketua Paskibra (Aulia)

Dokumentasi Wawancara Informan 4



Wawancara dengan Siswa/Danton Pramuka (Raditya)

Dokumentasi Wawancara Informan 5

Gambar Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3

K1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umusu.ac.id> E-mail: fdip@umusu.ac.id

Form : K - 1

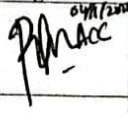

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nauraini Rusyid Panggabean
NPM : 2202060013
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 120 SKS

IPK = 3,92

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
	Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026	
	Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pembentukan Karakter Etika dalam Berpolitik Pada Siswa SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026	
	Analisis Literasi Politik Siswa dalam Mata Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 November 2025

Hormat, Pemohon,



Nauraini Rusyid Panggabean

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4

K2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
NPM : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

Dr.Zulkifli Amin, M.Si

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 November 2025
Hormat Pemohon,


Nauraini Rusyid Panggabean

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5

K3



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2631/IL.3-AU/UMSU-02/F/2025
Lamp : ---
Hal : Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
N P M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026


Pembimbing : Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan BATAL apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa taluwarasa tanggal : 04 November 2026

Medan, 13 Jumadil Awwal 1447 H
04 November 2025 M







Wassalam

Dra. Hj. Syamsu Yurnita, M.Pd.
NIDN : 0004066701

Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan

WAJIB MENGIKUTI SEMINAR

Lampiran 6

Surat Izin Riset

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK Pp/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://kip.umsu.ac.id> Email: kip@umsu.ac.id Instagram: @umsuamedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menerima surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

Nomor : 422/II.3-AU/UMSU-02/F/2025
Lamp : ---
Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 18 Sya'ban 1447 H
6 Februari 2026 M


Kepada : Yth. Bapak/ Ibu Kepala
SMA Asuhan Daya Medan
di
Tempat


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas sehari-hari. Sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut:


Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
NPM : 2202060013
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.




Dra. Hj. Samsuurnita, M.Pd
NIDN 0004066704

**** Penting! ****



Lampiran 7

Surat Balasan izin riset dari sekolah

**YAYASAN PERGURUAN ASUHAN
SMA ASUHAN DAYA**

JL. KAYU PUTIH TG. MULIA HILIR KEC. MEDAN DELI
KODE POS 20241 TEL. (061) 6626084

SURAT KETERANGAN

Nomor : 013 /SMA/AD/II/2026

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SMAS ASUHAN DAYA Medan menerangkan bahwa:

Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
Npm : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yang Terdaftar Di Atas Sudah Selesai Melaksanakan Penelitian Dengan Judul " Peran Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z Di Sekolah SMA Asuhan Daya Medan Tahun Ajaran 2025/2026. Demikianlah Surat Keterangan Ini Dibuat Agar Dapat Dipergunakan Sebaik-Baiknya.

Medan, 24 Februari 2026

Kepala Sekolah SMAS Asuhan Daya



ASINTRA SETIAWAN, S.Kom

Lampiran 8

Lembar Pengesahan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umhu.ac.id> E-mail: depan@umhu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Nauraini Rusyid Panggabean
N.P.M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Saya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.

sudah layak disidangkan.

Medan, 4 April 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Diketahui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Svamsuarnita, M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Lampiran 9

Berita Acara Bimbingan Penulisan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.ummu.ac.id> E-mail: fkip@ummu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Nauraini Rusyid Panggabean
N.P.M : 2202060013
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Literasi Politik Gen-Z di Sekolah SMA Asuhan Saya Medan Tahun Pelajaran 2025/2026.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/01/2026	Acc seminar proposal	[Signature]	
02/02/2026	Bimbingan pertama	[Signature]	
05/02/2026	Bimbingan kedua	[Signature]	
14/03/2026	Revisi Bab IV	[Signature]	
31/03/2026	Revisi Bab V	[Signature]	
02/04/2026	Revisi kesimpulan dan saran	[Signature]	
03/04/2026	Revisi Daftar Rujukan	[Signature]	
04/04/2026	Revisi lampiran Haver lengkap	[Signature]	
06/04/2026	Acc revisi akhir	[Signature]	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

[Signature]
Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, 06 April 2026
Dosen Pembimbing

[Signature]
Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Lampiran 10

Turnitin

skripsi-nauraini-rusyd-panggabean-2202060013_1775246974324.pdf

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet	757 words – 7%
2	repository.uinsu.ac.id Internet	437 words – 4%
3	Imam Alfikri Pratama. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Political Literacy dan Political Culture Warga Negara Muda", Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 2021 Crossref	342 words – 3%
4	fahum.umsu.ac.id Internet	244 words – 2%
5	repositori.umsu.ac.id Internet	64 words – < 1%
6	text-id.123dok.com Internet	47 words – < 1%
7	artikelpendidikan.id Internet	44 words – < 1%
8	repository.metrouniv.ac.id Internet	44 words – < 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Nauraini Rusyid Panggabean
NPM : 2202060013
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 05 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rumah Potong Hewan, Mabar
Anak Ke : 1
Alamat Email : naura2onaura@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : (ALM) Rusyid Panggabean, S.H.
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Suyanti, S.H.
Pekerjaan : Advokat / Pengacara
Alamat : Jl. Rumah Potong Hewan, Mabar

C. PENDIDIKAN

1. SD Swasta Bahagia
2. SMP Swasta Budi Mulia
3. SMA Negeri 3 Medan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara